

PENGARUH PDRB, IPM DAN KAPASITAS FISKAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2015-2019

Difa Faadila Kusuma* dan Deden Dinar Iskandar

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: difaadilakusuma@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a problem that occurs across the world, even in developed countries, especially in Indonesia. The increase in the poverty rate from year to year is a problem that must be faced by the community and the government. This study aims to analyze whether the independent variables consisting of GRDP, Fiscal Capacity, and HDI have an influence on the poverty rate in 34 provinces in Indonesia in 2015-2019. The data used in this study is panel data with time series data for the 2015-2019 period and a cross-section of 34 provinces in Indonesia. The analytical tool used is panel data regression analysis using the Eviews10 program. From the stages of analysis carried out, the results of data analysis showed that the results of the panel data estimation selected the best model, namely the Random Effect Model (REM). The results showed that the GRDP variable had a positive and significant effect on poverty, while the variables of Fiscal Capacity, and HDI have a negative and significant effect on the poverty level.

Keywords: Poverty, GRDP, Fiscal Capacity, and HDI.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.35116>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi paling mendesak untuk segera diatasi. Pemerintah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah prioritas karena memiliki dampak negatif dengan dimensi yang luas. Kemiskinan memiliki dampak pada penurunan kualitas hidup, menghambat terciptanya sumber daya manusia unggul, menciptakan beban sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan kriminalitas dan menurunkan ketertiban umum.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2019) jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya dampak positif dari program kemiskinan yang sudah diimplementasikan. Hal tersebut terlihat dalam laporan BPS pada tahun 2015 sampai dengan 2019 yang ditunjukkan pada Tabel 1 bahwa presentase penduduk miskin perkotaan turun dari 8,22% menjadi 6,56% sementara pada daerah perdesaan turun dari 14,09% menjadi 12,60%. Namun meskipun demikian jumlah penduduk miskin perkotaan hanya turun sebesar 3,72 juta orang. Selain itu masih adanya provinsi yang memiliki presentase kemiskinan diatas presentase nasional. Hal tersebut menandakan bahwa masih

adanya angka kemiskinan yang tinggi yang terjadi pada daerah provinsi yang ada di Indonesia.

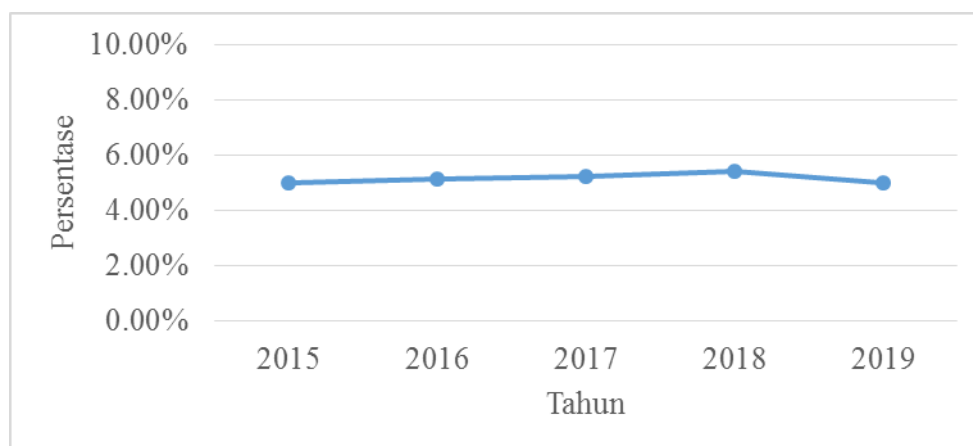
Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta)			Presentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2015	10.61	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13
2016	10.48	17.27	27.76	7.73	13.96	10.7
2017	10.27	16.31	26.58	7.26	13.47	10.12
2018	10.13	15.54	25.67	6.89	13.1	9.66
2019	9.86	14.93	24.79	6.56	12.60	9.22

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020), Diolah

Menurut *World Bank* dalam Saputra (2011), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (*unemployment*), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebijakan pemerintah dan masalah- masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (www.bappenas.go.id). Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi semakin menunjukkan banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang bekerja sehingga seharusnya mengurangi jumlah kemiskinan. (Saputra, 2011).



Gambar 1. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber: World Bank (2020), Diolah

Gambar 1 merupakan gambar Pertumbuhan ekonomi, Teori ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan banyaknya output nasional, mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang bekerja sehingga seharusnya mengurangi jumlah kemiskinan. Melihat Indonesia sendiri melalui

Gambar 1 laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Berdasarkan data yang diambil dari *World Bank* rata-rata kenaikan PDB dari tahun 2015 hingga 2019 sebesar 5,16%.

Menurut Kementerian Keuangan (2018), Kapasitas fiskal daerah dapat berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui pengeluaran pemerintah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan konsumsi penduduk miskin. Menurut Chitiga-Mabugu (2013) Kapasitas fiskal didefinisikan sebagai ukuran kemampuan otoritas daerah dalam meningkatkan pendapatan relative (*relative revenue*) terhadap pengeluaran yaitu biaya pengiriman barang dan jasa pada otoritas tertentu. Kapasitas fiskal dapat dilihat dari sisi penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Dalam sisi pendapatan, kapasitas fiskal dihitung dari seluruh kapasitas pendapatan pada suatu otoritas daerah dan selanjutnya upaya memperoleh pendapatan daerah. Disisi pengeluaran, Kebutuhan pengeluaran, merupakan ukuran penting kapasitas fiskal dari berbagai tingkatan pemerintahan, Indeks kapasitas fiskal merupakan alat penting dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk menilai dan meningkatkan ketidakseimbangan fiskal secara vertikal maupun horizontal dan akibatnya meningkatkan serta mempersempit kesenjangan dalam kualitas dan pengiriman barang publik pada suatu daerah. Dengan ketersediaan barang dan jasa publik yang memadai serta efisien akan memberikan kontribusi positif bagi pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi

Salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). IPM mengukur derajat pembangunan manusia yang merupakan salah satu aspek penting dari kualitas pembangunan ekonomi. IPM yang tinggi menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tinggi pula dan dapat diartikan sebagai keberhasilan pemerintahnya dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dari 188 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 111 dalam pencapaian IPM (UNDP, 2018). Nilai IPM Indonesia untuk 2018 adalah 0,707 — yang menempatkan negara Indonesia dalam kategori pembangunan manusia yang tinggi. Menurut Christophe Bahuat (Kepala Perwakilan UNDP Indonesia), "IPM untuk Indonesia menunjukkan bahwa setelah begitu banyak kemajuan yang dicapai, langkah selanjutnya menuju pembangunan manusia yang tinggi adalah inklusi dan pengurangan kesenjangan, khususnya untuk provinsi terpencil dan antara laki-laki dan Perempuan.

Tabel 2. Tren IPM Indonesia Berdasarkan Data Deret Waktu

Tahun	Harapan Hidup Saat Lahir	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	PNB Perkapita (2011 ppp\$)	Nilai IPM
2015	70.8	12.8	7.9	10,029	0.696
2016	71	12.9	8	10,419	0.701
2017	71.3	12.9	8	10,811	0.704
2018	71.5	12.9	8	11,256	0.707
2019	71.34	12.95	8.34	11,299	0.719

Sumber: United Nation Development Program (UNDP)

Menurut Tabel 2 diatas IPM di Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang mana diantara tahun 2015 dan 2019, nilai IPM Indonesia meningkat dari 0.696 menjadi 0.719. Selama periode yang sama, harapan hidup saat lahir

meningkat 0.54 tahun menjadi 71.34 tahun meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,16 tahun, rata-rata lama sekolah meningkat 0.44 tahun menjadi 8.34 tahun diikuti dengan meningkatnya harapan lama sekolah sebesar 0.15 tahun menjadi 12,95 tahun. PNB per kapita Indonesia meningkat menjadi 11,299 \$ antara tahun 2015 dan 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Partadiredja (dalam Pasaribu, 2005), Pembangunan atau pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai “proses pengurangan atau penghapusan kemiskinan, kepincangan distribusi pendapatan dan pengangguran” atau “*the reduction or elimination of poverty, inequality and unemployment within the context of a growing economy*” Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan beberapa negara berkembang banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Beberapa pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan, khususnya pada negara berkembang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan merupakan faktor penyebab luasnya cakupan yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan. Beberapa bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan ialah masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, masalah pembentukan modal, masalah pengerahan tabungan, serta permasalahan bantuan luar negeri. (Arsyad, 2010)

Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dari manusia. Dalam hubungan ini, World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu masalah yang bersifat multidimensi sebagai berikut :

Poverty is hunger. Poverty is lack of shelter. Poverty is being sick and not being able to go to school and not knowing how to read. Poverty is not having job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty is losing a child to illness bring about by unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom.

Walaupun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan yang dapat diterima, yang mana kesemuanya berada dilingkup dimensi ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing

daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

2. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir

3. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Indeks Pembangunan Manusia

Indikator kesejahteraan masyarakat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan hidup layak (*living standards*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Kapasitas Fiskal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 107 tahun 2018, Kapasitas fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam penelitian ini kapasitas fiskal diukur dengan:

$$KFD_{\text{provinsi-i}} = \text{pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}] \quad (1)$$

keterangan:

$KFD_{\text{provinsi-i}}$ = kapasitas fiskal daerah suatu provinsi

Pendapatan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak, dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang digunakan sebagai dasar perhitungan celah fiskal dalam formula dana alokasi umum (DAU). Sedangkan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Belanja tertentu sebagaimana dimaksud di atas meliputi Belanja

Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru, Belanja Bagi Hasil, dan Alokasi Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, variable dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan (Y), sedangkan variabel independennya adalah PDRB (X1), Kapasitas fiskal (X2), dan IPM (X3)

Tingkat Kemiskinan (Y)

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di masing-masing provinsi di Indonesia Data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Panel Modul Kosumsi dan Kor dengan rumus penghitungannya yaitu :

$$P = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \frac{z - y_i}{z} \quad (2)$$

di mana:

z = garis Kemiskinan

y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q), y_i < z

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk

Produk Domestik Regional Bruto (X2)

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Hadi Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. PDRB yang dimaksud adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 dan dinyatakan dalam juta rupiah tahun 2015 – 2019 (dalam satuan rupiah).

Kapasitas Fiskal (X2)

Kapasitas Fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah dan IKFD kabupaten/kota terdapat formula yang serupa

Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dari kapasitas fiskal masing - masing daerah Kabupaten/Kota dibagi dengan rata - rata kapasitas fiskal seluruh daerah Kabupaten/Kota. Kapasitas fiskal dihitung oleh karenanya Kapasitas fiskal dalam

penelitian ini dihitung dengan menggunakan ukuran Indeks Kapasitas Fiskal dengan rumusan:

$$IKFD_{\text{provinsi} - i} = \frac{KFD_{\text{provinsi} - i}}{(\sum KFD_{\text{provinsi}})/n} \quad (3)$$

keterangan:

$IKFD_{\text{provinsi} - i}$	= indeks Kapasitas Fiskal Suatu Daerah
$KFD_{\text{provinsi} - i}$	= kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
$\sum KFD_{\text{provinsi}}$	= total Kapasitas Fiskal Daerah provinsi
n	= 34 (tiga puluh empat) daerah provinsi

Indeks Pembangunan Manusia (X3)

IPM dinyatakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang mengukur usia harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup layak suatu kabupaten/kota. IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen tersebut adalah peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (living standards).

Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan dari 34, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB (X1), kapasitas fiskal (X2) dan IPM (X3).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam peneliian ini adalah model regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Method (REM)*. Alat analisis yang digunakan software Eviews 10. Persamaan dalam model penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 it + \beta_2 X_2 it + \beta_3 X_3 it + \epsilon_{it} \quad (4)$$

keterangan:

Y_{it}	= tingkat kemiskinan
X_1	= PDRB per kapita
X_2	= IKF
X_3	= IPM
β_0	= konstanta regresi
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= koefisien regresi
ϵ	= error
i	= <i>cross section</i> (provinsi)
t	= <i>time series</i> (tahun)

HASIL DAN PEMBAHSAN

Uji Statistik

Analisis data dilakukan dengan metode Random Effect Method (REM). Data yang diolah adalah data panel dengan objek penelitian 34 provinsi di Indonesia dengan kurun waktu 2015 – 2019. Analisis ini untuk melihat pengaruh PDRB, kapasitas fiskal, dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Data Panel *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.14270	16.67209	2.407778	0.0171
X1	0.522503	0.611842	0.853983	0.3943
X2	-0.150575	0.046941	-3.207739	0.0016
X3	-0.659912	0.062157	-10.61684	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.631271	Mean dependent var		0.470417
Adjusted R-squared	0.624607	S.D. dependent var		0.711939
S.E. of regression	0.436200	Sum squared resid		31.58491
F-statistic	94.73175	Durbin-Watson stat		0.841308
Prob(F-statistic)	0.000000			

Bedasarkan estimasi regresi data pada Tabel 3, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 40,143 + 0,523 X1 - 0,151 X2 - 0,659 X3 + \varepsilon \quad (5)$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi R^2 dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel PDRB (X1), IKF (X2), dan IPM (X3) akan diikuti oleh variabel dependen Kemiskinan (Y) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai Adjusted R^2 karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. Nilai Adjusted R^2 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi

R-squared	0.631271	Mean dependent var	0.470417
Adjusted R-squared	0.624607	S.D. dependent var	0.711939
S.E. of regression	0.436200	Sum squared resid	31.58491
F-statistic	94.73175	Durbin-Watson stat	0.841308
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 4, besar angka R-Square (R^2) adalah 0,631 atau 63,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen PDRB (X1), IKF (X2), dan IPM (X3) memberikan informasi terhadap variabel Kemiskinan (Y) adalah sebesar 63,1%. Sedangkan sisanya sebesar 36,9% dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

Uji Statistik F

Uji F pada penelitian ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah variabel PDRB (X1), IKF (X2), dan IPM (X3) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Kemiskinan (Y). dengan menggunakan taraf keyakinan 95 persen ($\alpha = 5\%$), *degree of freedom for numerator* (df_n) sebesar 4 ($k-1 = 5-1$), dan *degree of freedom for denominator* (df_d) = 165 ($N-k = 170-5$), maka diperoleh nilai F-tabel sebesar 2,43. Berdasarkan hasil regresi diperoleh F-statistik sebesar 94.73175, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (F-statistik lebih besar dari F-tabel) dan persamaan tersebut dinyatakan telah lulus uji F-statistik.

Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial atau individu, apakah variabel independen memiliki pengaruh dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Pada taraf signifikansi 5% (0,05) dan *degree of freedom* (df) = 206 ($N - k = 210 - 4$) maka diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,652357. Hasil regresi menunjukkan t statistik masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel PDRB (X1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan secara individual terhadap Kemiskinan (Y) karena t hitung sebesar 0.853983 t hitung < t tabel.
2. Variabel IKF (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap Kemiskinan (Y) karena t hitung sebesar 3.207739 t hitung > t tabel.
3. Variabel IPM (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap Kemiskinan (Y) karena t hitung sebesar 10.61684t hitung > t tabel.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan pada 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,3943 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0.523. Nilai koefisien 0.523 menunjukkan setiap 1 persen kenaikan PDRB Per Kapita maka akan menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 0.523 persen. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti dimana variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Kemiskinan. Akan tetapi sesuai dengan penelitian Andhyka (2018) mengemukakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap kemiskinan artinya ketika PDRB mengalami peningkatan maka Tingkat Kemiskinan akan mengalami peningkatan sesuai dengan teori kemiskinan relatif yang dikemukakan oleh Miller (dalam Arsyad, 2010) menyatakan bahwa garis kemiskinan akan berubah apabila kondisi

perekonomian masyarakat meningkat yang di sebabkan oleh inflasi, sehingga kemiskinan akan selalu ada

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanti (2013) dan Andhykha (2018) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan

Pengaruh Kapasitas Fiskal terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa Kapasitas Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar -0.151. Nilai koefisien -0.151 menunjukkan setiap 1 persen kenaikan kapasitas fiskal maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0.151. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Franciari (2012) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal mempunyai hubungan negatif. Artinya semakin tinggi kapasitas fiskal suatu kabupaten/kota, maka semakin rendah kemiskinan yang terjadi di kabupaten/kota tersebut.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai signifikan sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar -0.659. Nilai koefisien -0.659 menunjukkan setiap 1 persen kenaikan IPM maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar 0.659. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2011) yang menyatakan bahwa Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai tanda negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sesuai dengan hipotesis, tanda negatif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Nilai IPM yang dalam perhitungannya mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan suatu daerah

Selain itu hasil penelitian ini sejalan dengan Franciari (2012), Saputra (2011), dan Andhyka (2018) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dari 34 provinsi di Indonesia, provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu papua, sedangkan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling rendah yaitu DKI Jakarta.
2. Berdasarkan pada hasil penelitian, variable PDRB berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia. yang artinya meningkatnya PDRB belum mampu menurunkan kemiskinan yang mana apabila PDRB mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan meskipun tidak memiliki pengaruh yang signifikan sesuai dengan teori kemiskinan relatif yang menyatakan bahwa garis kemiskinan akan berubah apabila kondisi perekonomian masyarakat meningkat yang di sebabkan oleh inflasi, sehingga kemiskinan akan selalu ada

3. Berdasarkan pada hasil penelitian, variabel kapasitas fiskal berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. yang artinya semakin tinggi kapasitas fiskal suatu provinsi, maka semakin rendah kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut.
4. Berdasarkan pada hasil penelitian, variabel IPM berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia. yang artinya semakin tinggi IPM suatu provinsi, maka semakin rendah kemiskinan yang terjadi di provinsi tersebut.

REFERENSI

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). STIM YKPN.
- Chitiga-Mabugu, M., & Monkam, N. (2013). Assessing fiscal capacity at the local government level in South Africa. *University of Pretoria, Department of Economics Working Papers*, (201376).
- Franciari, P. S., & Sugiyanto, F. X. (2012). *Analisis hubungan IPM, kapasitas fiskal, dan korupsi terhadap kemiskinan di Indonesia: Studi kasus 38 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010* [Unpublished doctoral dissertation]. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Saputra, W. A., & Mudakir, Y. B. (2011). *Analisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB, IPM, pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 3(2), 146-170.
- Susanti, S. (2013). Pengaruh produk domestik regional bruto, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Jawa Barat dengan menggunakan analisis data panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 1412-6184.